

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

DIPPOS LUHUT TAMBUNAN

32.0253

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [32.0253 @praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0253@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH.,S.Sos,M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Poverty is still a major problem in Indonesia and is a priority in the national development agenda. One of the government's efforts to overcome poverty is through the policy of developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Ratu Agung District is one of the areas where this policy is implemented. However, the effectiveness of this policy in reducing poverty still needs to be evaluated in depth. **Purpose:** This study aims to evaluate the effectiveness of the MSME development policy in reducing poverty in Ratu Agung District and to identify the obstacles faced in its implementation. **Method:** The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants in this study include MSME actors, sub-district government officials, and other related parties. **Results:** The results of the study indicate that the MSME development policy in Ratu Agung District has a positive impact on increasing community income and reducing unemployment rates. However, the implementation of the policy still faces a number of obstacles such as limited access to capital, uneven training, and weak ongoing assistance. **Conclusion:** To improve the effectiveness of MSME development policies as a poverty alleviation strategy, local governments need to strengthen synergy between agencies, expand access to financing, and improve the quality and reach of training programs and ongoing mentoring.

Keywords: Policy Evaluation, MSMEs, Reducing Poverty Rates

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia dan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan masih perlu dievaluasi secara mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM, aparatur pemerintah kecamatan, dan pihak terkait lainnya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan

penurunan tingkat pengangguran. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan akses permodalan, pelatihan yang belum merata, serta lemahnya pendampingan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengembangan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antarinstansi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan program pelatihan serta pendampingan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, UMKM, Penurunan Angka Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi utama dalam menjamin ketertiban, keamanan, pemenuhan hak asasi manusia, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang terus menjadi fokus pemerintah adalah kemiskinan, yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat tetapi juga kestabilan ekonomi dan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, sebanyak 25,22 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin, mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif. UMKM menjadi salah satu sektor strategis yang diandalkan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal. Dengan lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya pelatihan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital.

Di Kota Bengkulu, potensi UMKM telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM. Data Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 3.346 UMKM dengan total omzet mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Kecamatan Ratu Agung menjadi salah satu kecamatan dengan kontribusi signifikan, yakni sebanyak 387 UMKM dengan omzet lebih dari 5,5 miliar rupiah. Selain itu, data tahun 2023 mencatat adanya 108.000 pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu yang terdaftar melalui program PLKUMKM, dengan dominasi pada sektor perdagangan, makanan, kerajinan, dan jasa. Kecamatan Ratu Agung dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa alasan strategis. Wilayah ini meskipun berada di pusat kota, masih memiliki kantong-kantong kemiskinan dan belum maksimal dalam mengelola potensi ekonominya. Di sisi lain, sebagai wilayah padat ekonomi, Ratu Agung memiliki peluang besar dalam pengembangan UMKM yang bisa diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan evaluasi yang tepat terhadap kebijakan pengembangan UMKM, diharapkan dapat dirumuskan solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan di wilayah ini secara berkelanjutan.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun UMKM telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, masih belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Padahal, Kecamatan Ratu Agung merupakan wilayah yang strategis terletak di pusat kota dan memiliki potensi ekonomi tinggi namun masih memiliki wilayah rawan kemiskinan dan belum

mampu mengoptimalkan potensi UMKM secara maksimal. Selain itu, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya adopsi teknologi, dan lemahnya pelatihan serta pendampingan UMKM belum dikaji secara mendalam dalam konteks lokal. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan pengembangan UMKM secara spesifik di Kecamatan Ratu Agung, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan perhatian yang luas terhadap pengembangan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan, namun masing-masing memiliki fokus, pendekatan, dan konteks yang berbeda. Hasanah et al. (2022) mengevaluasi efektivitas program UMKM dalam menanamkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat di Kota Serang menggunakan pendekatan kualitatif dan teori evaluasi program. Studi ini menekankan pentingnya nilai sosial sebagai bagian dari keberhasilan program UMKM. Latifah dan Murad (2022) menelaah kebijakan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Kabupaten Tegal, menggunakan teori kebijakan publik dari William Dunn dan Leo Agustino. Fokus penelitian ini mencakup aspek efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia, serta kontribusinya terhadap resiliensi ekonomi.

Hasri et al. (2014) menganalisis peran pengembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Werner Sombart. Penelitian ini menekankan pada kontribusi UMKM terhadap indikator makroekonomi daerah. Sementara itu, Rachmawati (2020) mengkaji kontribusi UMKM dalam pengentasan kemiskinan secara nasional dengan pendekatan teori vicious circle of poverty dari Ragnar Nurkse. Studi ini menekankan potensi UMKM sebagai strategi keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Fitria et al. (2023) berbeda dari mayoritas studi lain dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengembangan UMKM terhadap pengentasan kemiskinan, memperkuat hubungan korelasional antara variabel ekonomi. Anggreani (2018) menelaah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan pelaksana kebijakan dalam menentukan efektivitas program.

Penelitian-penelitian tambahan yang relevan turut memperkuat temuan sebelumnya. Mahardhika et al. (2024) mengevaluasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung dan menemukan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, masih terdapat kendala seperti akses permodalan dan pemasaran. Kurniawan & Fauziah (2014) mengungkapkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi hambatan struktural seperti infrastruktur dan pendampingan yang lemah. Sementara itu, Ariyani et al. (2016) mengembangkan pendekatan evaluasi menggunakan teknik Rappoverty yang menekankan pentingnya koordinasi dan ketepatan program dalam pengentasan kemiskinan.

Ramadani & Syariati (2021) menganalisis pengaruh ekonomi digital dan tingkat persaingan terhadap pendapatan UMKM di Makassar. Dengan menggunakan teknik analisis korelasi Pearson terhadap data dari 50 wirausahawan, studi ini menemukan bahwa kedua faktor tersebut

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hal ini menekankan pentingnya adaptasi UMKM terhadap lingkungan digital dan persaingan pasar.

Widjajanti et al. (2022) menambahkan perspektif baru dengan meneliti penerapan Business Model Canvas (BMC) pada UMKM Batik di Kabupaten Blora. Fokus utama adalah pada segmen pelanggan, proposisi nilai, sumber daya utama, dan mitra utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan aspek-aspek ini penting untuk meningkatkan daya saing UMKM Batik Blora yang selama ini lemah dalam hal SDM, inovasi, permodalan, teknologi, dan pemasaran. UMKM Batik juga dipandang berpotensi besar dalam pelestarian kearifan lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Wartika et al. (2025) membangun Sistem Informasi Geografis (WebGIS) yang memberikan informasi lokasi dan kategori UMKM secara visual melalui Google Maps. Sistem ini bermanfaat untuk monitoring, evaluasi, promosi, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan UMKM secara lebih strategis dan transparan.

Dalam konteks keselamatan kerja, Padhil et al. (2025) mengembangkan model integratif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk UMKM dengan sistem produksi job shop menggunakan pendekatan makro-ergonomi dan HFACS. Faktor-faktor seperti pengawasan, struktur organisasi, teknologi yang sesuai, serta SDM kompeten terbukti signifikan dalam mengurangi tindakan tidak aman di tempat kerja UMKM.

Selanjutnya, Kohardinata et al. (2023) menyajikan kajian unik mengenai pengaruh P2P lending terhadap kredit perbankan non-UMKM di berbagai provinsi. Temuan pentingnya adalah bahwa P2P lending berperan sebagai pelengkap dalam situasi likuiditas bank yang longgar, namun efeknya berkurang ketika likuiditas semakin ketat. Studi ini menyoroti pentingnya dinamika sektor keuangan digital dalam mendukung pembiayaan, khususnya dalam konteks regional dan perbankan.

Dari keseluruhan studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah dalam fokus terhadap kebijakan UMKM sebagai alat pengentasan kemiskinan, dengan dominannya pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik dan potensi UMKM yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kebijakan lokal berbasis UMKM dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu memiliki kebaruan ilmiah yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu bentuk kebaruan terletak pada lokasi penelitian yang secara spesifik menyoroti Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu, sebuah wilayah yang belum banyak dikaji dalam konteks pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah lain seperti Kota Serang (Hasanah et al. 2022), Kabupaten Tegal (Latifah dan Murad, 2022), Kabupaten Ngawi (Hasri et al. 2014), dan Kabupaten Sidoarjo

(Anggreani, 2018), yang tentu memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini secara langsung mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan UMKM dalam kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan, bukan hanya sekadar melihat dampak pengembangan UMKM terhadap peningkatan ekonomi secara umum. Sementara beberapa penelitian sebelumnya hanya menekankan aspek pemberdayaan, pertumbuhan ekonomi, atau ketahanan ekonomi, penelitian ini mengkaji secara mendalam hubungan sebab-akibat antara implementasi kebijakan dan capaian penurunan kemiskinan. Dari sisi metodologi, meskipun pendekatan kualitatif juga digunakan dalam sebagian besar penelitian terdahulu, fokus pada evaluasi kebijakan di tingkat kecamatan dan identifikasi kendala pelaksanaan secara lokal menjadikan penelitian ini lebih aplikatif dan kontekstual dalam memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan berbasis daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterapkan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi kebijakan tersebut dilakukan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Ketiga, melalui temuan lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan solusi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan keberhasilan program pengembangan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan di tingkat lokal..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteksnya (Creswell, 2013). Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan situasi dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar fenomena. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Operasional konsep penelitian berfokus pada evaluasi kebijakan pengembangan UMKM menggunakan teori Evaluasi Kebijakan oleh William N. Dunn (2003). Data dikumpulkan dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati, 2019:179). Kemudian observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan publikasi terkait. Informan dipilih menggunakan purposive sampling untuk narasumber dari instansi pemerintah dan snowball sampling untuk masyarakat, guna memperoleh data yang relevan dan representatif (Lenaini, 2021). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan aktif dalam pengumpulan data dan analisis secara langsung di lapangan (Rohmad, 2017). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi terstruktur, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan valid (Abubakar, 2021; Citriadin, 2020). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode naturalistik yang menuntut pemahaman mendalam dan pengolahan

data secara sistematis hingga mencapai kejenuhan data (Citriadin, 2020). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi berdasarkan kata-kata dan konteks yang diperoleh selama penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah terkait evaluasi kebijakan pengembangan UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Fokus penelitian mencakup identifikasi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penulis menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn yang meliputi enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

3.1 Evaluasi kebijakan pengembangan UMKM dalam penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

1. Efektivitas.

Kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sudah cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa pihak, seperti aparat kecamatan dan masyarakat, menilai bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif terutama dalam menjangkau pelaku UMKM di tingkat kelurahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya daya beli masyarakat akibat pendapatan per kapita yang masih kecil, kurangnya koordinasi antara dinas terkait seperti Dinas Koperasi dengan pihak kecamatan, serta belum meratanya distribusi bantuan permodalan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini telah berjalan dengan baik, peningkatan efektivitas masih diperlukan melalui perbaikan koordinasi lintas instansi serta pemerataan akses bantuan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai tingkat maksimal. Usaha yang dilakukan seperti pemberian pelatihan keterampilan dan penyediaan tenaga ahli dinilai sudah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya, baik alam maupun manusia, masih belum dioptimalkan secara menyeluruh. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain belum meratanya pemanfaatan potensi wilayah, terbatasnya kelompok yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, serta masih adanya pelaku UMKM yang belum menjadikan usahanya sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan monitoring dan evaluasi dari lembaga terkait serta penargetan yang lebih tepat agar pengalokasian dana dan bantuan lebih

efisien dan tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

3. Kecukupan

Dari segi kecukupan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung sudah cukup baik dan relatif berimbang dengan output yang dihasilkan. Beberapa narasumber menilai bahwa sumber daya yang tersedia, baik dari segi pendanaan, pelatihan, maupun pemanfaatan teknologi seperti media sosial, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang ada serta kurangnya monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pihak pemerintah. Minimnya pengawasan ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan sumber daya dan menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan serta evaluasi yang konsisten guna memastikan bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan maksimal dalam mendukung keberhasilan program pengembangan UMKM.

4. Kemerataan

Pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung masih belum berjalan secara optimal. Masyarakat mengakui bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi sebagian pelaku UMKM, namun pembagian bantuan, khususnya dalam hal permodalan, belum merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, justru tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pendataan dan penargetan bantuan, sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem distribusi dan verifikasi penerima bantuan sangat diperlukan agar prinsip keadilan dalam kebijakan dapat benar-benar terwujud.

5. Responsivitas

Responsivitas masyarakat terhadap kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung secara umum bersifat positif. Masyarakat menilai bahwa kebijakan ini sangat baik dan bermanfaat dalam membantu mengatasi kemiskinan, terutama bagi pelaku UMKM. Namun demikian, masih terdapat kendala utama yang menjadi sorotan, yaitu belum meratanya pembagian bantuan permodalan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku UMKM dapat merasakan manfaat secara langsung, sehingga mengurangi efektivitas dari respon positif yang telah ditunjukkan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pemerataan bantuan menjadi aspek penting yang perlu dibenahi agar respons masyarakat semakin positif dan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas.

6. Ketepatan

Kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung telah berjalan dengan baik dan dinilai membantu masyarakat, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan modal. Banyak pelaku UMKM yang belum menerima bantuan secara merata, bahkan ada yang usahanya gulung tikar akibat daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum

sepenuhnya tercapai, sehingga masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem pelaksanaan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak optimal.

3.2 Faktor-faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan Pengembangan UMKM di Kecamatan Ratu Agung

1. Rendahnya Kreativitas dan Inovasi dari pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Kecamatan Ratu Agung masih rendah dalam menciptakan inovasi serta berkreasi dalam menciptakan dan mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi penyebab kurangnya tingkat bersaing sehingga persaingan dalam mengembangkan usaha berputar di satu hal saja, dan hal ini menyebabkan pasar atau pelaku UMKM yang tidak bertahan lama.

2. Rendahnya daya beli masyarakat

Daya beli masyarakat yang rendah menjadi salah satu problem yang terjadi dan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kebijakan pengembangan UMKM. Daya beli masyarakat yang 66 rendah juga diperkuat dengan PAD pemerintah daerah yang terbilang rendah.

3. Ketersediaan data yang kurang

Ketersediaan data yang dibutuhkan masih sangat kurang. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap jalannya kebijakan. Data yang kurang menyebabkan kurang efektifnya pemberian bantuan permodalan terhadap pelaku UMKM yang dinilai berpotensi.

4. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah terhadap progres atau kemajuan dari kebijakan pengembangan UMKM ini jadi faktor penghambat terhadap jalannya kebijakan ini. Pelaku UMKM cenderung lebih asal-asalan dalam menjalankan usahanya dan tidak memperhatikan SOP dari ketentuan pemberian permodalan sehingga kebijakan ini lebih terlihat seperti “pemberian sumbangan sukarela” terhadap pelaku UMKM.

3.3 Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan pengembangan UMKM

1. Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam menghasilkan atau menciptakan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan usahanya. Hal ini menjadikan semua usaha yang ada memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri dalam pandangan masyarakat yang notabene sebagai pembeli.

2. Melakukan kegiatan pasar bazar setiap akhir minggu sebagai salah satu cara meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perkembangan dari jalannya kebijakan pengembangan UMKM.

3. Melakukan pendataan secara konkrit melalui sensus data pelaku UMKM serta jenis usahanya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan permodalan.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaku UMKM dalam menunjang kemajuan kebijakan pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan juga agar selain melakukan monitoring, juga bisa mendengar aspirasi dari pelaku UMKM yang bisa menjadi kunci dari sebuah permasalahan terhadap jalannya kebijakan pengembangan UMKM.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pengembangan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi sebagian pelaku UMKM, masih terdapat berbagai hambatan seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya inovasi dari pelaku UMKM, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti studi Hasanah et al. (2022) yang menekankan nilai-nilai sosial dalam program UMKM di Kota Serang, pendekatan dalam penelitian ini lebih komprehensif karena tidak hanya melihat dampak sosial, tetapi juga mempertimbangkan dimensi teknis dan administratif kebijakan. Sementara itu, Latifah dan Murad (2022) menyoroti peran Bank Indonesia dalam penguatan ketahanan ekonomi melalui UMKM, dengan fokus pada regulasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek efektivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi tantangan serupa, seperti dalam konteks Kecamatan Ratu Agung. Penelitian Hasri et al. (2014) dan Rachmawati (2020) menempatkan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dan solusi jangka panjang dalam memutus lingkaran kemiskinan. Namun, keduanya belum secara spesifik membahas dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian di Ratu Agung lebih memberikan pemahaman kontekstual terkait bagaimana kebijakan berjalan dalam praktik, termasuk hambatan struktural seperti data yang tidak akurat dan lemahnya koordinasi lintas instansi.

Penelitian Mahardhika et al. (2024) yang menyoroti permasalahan permodalan dan pemasaran UMKM di Kabupaten Badung memiliki kemiripan dengan hasil penelitian ini, terutama terkait belum meratanya bantuan dan rendahnya efektivitas distribusi kebijakan. Sementara itu, studi Kurniawan & Fauziah (2014) serta Ariyani et al. (2016) yang menekankan pentingnya infrastruktur, pendampingan, dan koordinasi sebagai penentu keberhasilan kebijakan UMKM, juga memperkuat temuan bahwa kelemahan dalam aspek pelaksanaan (implementation gap) menjadi penghambat utama keberhasilan program. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini adalah pada konteks geografis dan fokus lokal yang spesifik, yakni di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Sementara persamaannya terletak pada kesimpulan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada ketersediaan kebijakan, tetapi juga pada ketepatan implementasi, pendataan yang akurat, dukungan regulasi,

dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Penelitian ini turut memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan kebijakan daerah melalui identifikasi hambatan dan usulan solutif berbasis konteks lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan pengembangan UMKM dalam penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan UMKM sudah cukup efektif namun belum optimal. Dampak positif telah dirasakan oleh masyarakat, tetapi implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor seperti rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakmerataan distribusi bantuan permodalan. Dari segi efisiensi, pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik meskipun belum maksimal, dimana pelatihan keterampilan dan penyediaan tenaga ahli telah memberikan kontribusi positif, namun pengelolaan sumber daya alam dan manusia masih belum dioptimalkan secara menyeluruh. Sementara itu, aspek kecukupan menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif berimbang dengan output yang dihasilkan, meskipun masih diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya. Dari sisi pemerataan, kebijakan ini belum berjalan optimal dalam hal distribusi manfaat, dimana pembagian bantuan permodalan belum merata dan belum tepat sasaran sehingga belum dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, responsivitas masyarakat terhadap kebijakan ini cenderung positif, walau masih terkendala oleh ketidakmerataan pembagian bantuan permodalan. Dalam hal ketepatan, kebijakan ini telah dinilai membantu masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih belum tepat sasaran, terutama dalam pemberian bantuan modal. Adapun faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengembangan UMKM ini meliputi rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku UMKM, rendahnya daya beli masyarakat, ketersediaan data yang kurang memadai, serta kurangnya monitoring dan evaluasi oleh pemerintah. Dengan demikian, masih diperlukan upaya perbaikan yang lebih sistematis dan terarah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengembangan UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Kantor Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*.

Anggreani, L. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id/74993/>

- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2016). Evaluasi program pengentasan kemiskinan menggunakan metode rappoverty. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 181–197. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.347>
- Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (M. P. Dr. Hj. Lubna, Ed.). Sanabil.
- Creswell, J. W. (2013). *QUALITATIVE Choosing Among Five Approaches*.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis*.
- Fitria, Y. (2023). Analisis Pengaruh Pengembangan UMKM Dalam Mengetaskan Kemiskinan. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 4(2).
- Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Evaluasi Program Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Model Kewirausahaan Sosial Di Kota Serang). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 197–210. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/17529/0>
- Hasri, B. (2014). *Analisis pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran daerah di Kabupaten Ngawi* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). <https://www.neliti.com/publications/13885/analisis-pengembangan-usaha-mikro-kecil-menengah-untuk-meningkatkan-pertumbuhan>
- Kohardinata, C., Widianingsih, L. P., Stanley, N., Junianto, Y., Ismawati, A. F., & Sarib, E. T. (2023). Collaborative enhancement of non-MSME credit and optimization of banking idle funds through P2P platforms. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.019>
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165–176. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436>
- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan*. 6(1), 33–39.
- Latifah, N. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.211>
- Mahardhika, I. N., Widanti, N. P. T., Widnyani, I. A. P. S., & Bidul, I. A. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. *ECo-Buss*, 7(2), 1229–1239. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1720>
- Nurdin, I., & Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Padhil, A., Purnomo, H., Soewardi, H., & Widodo, I. D. (2025). Integrative Model Investigation of Occupational Safety and Health for MSMEs Using a Macro-Ergonomics Approach and Human Factors Analysis and Classification. *International Journal of Industrial Engineering*, 36(1), 145–158. <https://doi.org/10.22068/ijiepr.36.1.2154>
- Ramadani, D. F., & Syariati, A. (2021). Ekonomi Digital dan Persaingan Usaha sebagai Pendorong Pendapatan UMKM di Kota Makassar. *ICOR: Journal of Regional*

Economics, 1(1). Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/icor/article/view/19558>

Rachmawati, M. (2020). Kontribusi sektor UMKM pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(07), 1–13. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/86>

Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Rohmad. (2017). *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*.

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Wartika, Wahyuni, W., Hasti, N., Pangaribuan, I., & Nurpalah, A. (2025, February). Web-based geographic information system to determine the location of UMKM (Case study in the Central Antapani region). In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3200, No. 1, p. 040013). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0254451>

Widjajanti, K., Prihantini, F.N., Wijayanti, R. (2022). Sustainable development of business with canvas business model approach: Empirical study on MSMEs Batik Blora, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(3), 1025–1032. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170334>

